

**PENGARUH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENGUATAN
KEMAMPUAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (*CIVIC SKILL*)
PADA SISWA DI SMP NEGERI 26 SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Oleh:

Feri Agus Nugroho,¹⁾ Sugiaryo,²⁾ Anita Trisiana³⁾

¹⁾ *Mahasiswa PPKn*

²⁾ *Dosen Prodi PPKn FKIP UNISRI*

³⁾ *Dosen Prodi PPKn FKIP UNISRI*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta. 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat siswa dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan pada Pendidikan Kewarganegaraan. 3) Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan, kepala sekolah dan siswa, untuk memperoleh data mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan keterampilan kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan dengan guru menyusun perangkat pembelajaran, baik berupa silabus, RPP dan lembar penilaian siswa, selanjutnya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, misalnya ceramah bervariasi tanya jawab, diskusi dan resitasi (penugasan). 2) Faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran Pelajaran Kewarganegaraan guna membentuk keterampilan kewarganegaraan yaitu adanya dukungan dari kepala sekolah yang mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan sekolah serta kompetensi guru PKN dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Sedangkan faktor yang menghambat siswa dalam mengikuti Mata Pelajaran Kewarganegaraan yaitu terlalu banyak materi yang harus dikuasai oleh siswa, materi Pendidikan Kewarganegaraan terkesan *overload*, tumpang tindih, begitu banyak hal yang harus diajarkan dan dihafalkan oleh siswa, sehingga membebani siswa, keterbatasan metode dan media pembelajaran, latar belakang siswa yang beraneka ragam, keterbatasan waktu dalam mengajar, kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 3) Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah setiap pertemuan diberikan informasi terbaru terkait persoalan yang sedang terjadi untuk menarik perhatian siswa agar lebih fokus dalam pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang sifatnya non-akademik atau ekstrakurikuler seperti lewat kegiatan upacara, kegiatan kepramukaan, serta pemberian motivasi di setiap kegiatan pembelajaran guna menumbuhkan semangat dan minat siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Keterampilan Kewarganegaraan

ABSTRACT

The research aims at (1) finding out the implementation of learning civic education at SMPN 26 Surakarta, (2) Knowing the factor that support and inhibit the student in improving civic skill on civic education, (3) finding out the effort to solve inhibitability occurring in the implementation of learning civic in improving civic skill at SMPN 26 Surakarta. The type of research is descriptive qualitative approach. The sources of data are primary and secondary data. The subject of research are teachers og civic education, the principal and the student, to collect data about civic education in strengthening civic skill at SMPN26 Surakarta. The techniques in collecting utilixed interview, observation, and documentation. The data trusworthiness used source and method triangulations. In analyzing the data, the researcher used interractive analysis. Based on the research findings, it could be concluded that (1) the implementations of civic subject at SMPN 26 Surakarta in the academic year 2018/2019 was conducted by the teachers in designing learning tools, either a syllabi, a and a sheet of the student' scoring, then they applied the learning process through a variety of teaching methods, such as a lerturing varried with question and answers, discussions, and tasks; (2) the factors that support the implementation of civic subject to from civic skil skill are the principal support all of school's activities and the competency of civic teachers in teaching. Meanwhile the factor inhibiting the student in taking civic subject are there are lots of civic learning materials that have to be mastered by that students, the civic learning materials seem overload and overlapping, there are a lot of things that have to be taught and memorized by the student so it gives lots of duties for them, the limitation of learning method and media, they have various educational background the limitation of time to teach and they are lacked of motivation toward civic subject; (3) the efforts their attention so that they more focus in the classroom, implementing extracuricular learning., e.g a ceremony, taking a scout activity. Giving motivation in the every meeting of civic subject in order to grow the spirit and the interest og student toward civic subject.

Keywords : Civic Education, Civic Skill

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang lain tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Proses pendidikan peserta didik secara *intensif* akan mengembangkan potensi siswa untuk memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui pendidikan diharapkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan. Pendidikan meliputi pengajaran berupa keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari para siswa baik sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah memberikan pengertian pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah serta meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak ke-Indonesia (Diknas, 2009: 6)

Penelitian Nogueira dan Moreira (2011) menyimpulkan bahwa: pencapaian pendidikan tergantung pada berbagai mekanisme yang mempengaruhi proses belajar mengajar, seperti menyoroti pengetahuan guru dan adanya interaksi

sosial yang aktif antara guru dan siswa, sehingga proses interaksi terjadi dua arah dan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dalam proses interaksi dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik pula. Hal ini menegaskan bahwa masih ada penyimpangan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran seharusnya tidak lagi menjadi wahana mengajar (*teaching*) tetapi lebih diarahkan sebagai wahana belajar (*learning*), karena pembelajaran merupakan proses pendewasaan seseorang. Pembelajaran (*learning*) harus lebih menyenangkan, mengasyikan, mencerdaskan peserta didik, dimana guru mampu mengembangkan pola pikir dan mengubah sikap serta perilaku siswa. Guru tidak hanya mengajar untuk mencapai hasil ujian tertentu, tetapi mengembangkan siswa secara utuh, disiplin, jujur, sesuai norma-norma masyarakat. Di samping itu guru juga tidak hanya mengajar untuk menghadapi ujian akhir saja, tidak hanya sebagai tutor saja, tetapi juga sebagai fasilitator (Chotimah, U. 2012 : 324).

Peneliti ingin mengkaji proses kegiatan belajar mengajar murid di SMP Negeri 26 Surakarta. Sistem pembelajaran di SMP Negeri 26 Surakarta sebagian besar gurunya masih mengacu pada buku, Sistem kegiatan belajar mengajar tersebut dapat ditandai dengan fakta-fakta yang terjadi, yaitu : (1) Guru dalam sistem pembelajaran terlalu banyak memberikan materi teori dan siswanya merasa kurang memahami apa yang disampaikan oleh guru sebesar 60 % atau 20 siswa; (2) Guru memberikan tugas yang berat dan minat siswa untuk belajar berkurang sebesar 50 % atau 18 siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut pendidik harus menemukan metode lain agar apa yang dijelaskan dapat tersampaikan kepada peserta didik. Terdapat berbagai mata pelajaran untuk

menunjang pendidikan dalam kurikulum, salah satu mata pelajaran adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).Cholisin (2003:2) menyatakan, komponen penting yang hendak dikembangkan dalam mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu warga Negara yang cerdas (memiliki pengetahuan kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi) dan berkarakter (loyal kepada bangsa dan Negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945).

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skill* mencakup *intelectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan / mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menngemukakan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik (Cholisin, 2005: 3).Pendapat tersebut menunjukkan bahwa salah satu keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan mengemukakan pendapat. Kemampuan bertanya dan mengajukan pendapat ini sangat penting bagi siswa sebab dengan mengajukan pendapat dan bertanya guru akan tahu sejauh mana siswa menguasai bahan ajar dan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dalam mempelajari bahan ajar tersebut.

Rendahnya kemampuan berpendapat ditunjukkan dengan kegiatan siswa yang hanya mendengarkan, mencatat penjelasan guru, mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga siswa terlihat pasif.Komunikasi satu arah, tentu saja, pembelajaran seperti ini kurang menyenangkan.

Namun pada kenyataanya pendidikan kewarganegaran di SMP Negeri 26 Surakarta masih hanya di anggap hal yang biasa saja dan tidak terlalu di upayakan yang terbaik, seperti siswa hanya di suruh membaca tanpa diberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, guru yang menerangkan sama halnya yang ada di buku tanpa memberikan penguatan yang rill. Selain itu keterampilan kewarganegaraan guru di SMP Negeri 26 Surakarta masih belum terbaru dan masih menggunakan cara pembelajaran yang monoton, sehingga mengakibatkan siswa malas dalam mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan serta hanya menghafalkan saja tanpa mau mengaplikasinya dalam kehidupan sehari hari.

Kesesuaian buku ajar dan pelaksanaannya dengan kurikulum sangat penting karena mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Buku ajar yang disusun sesuai ketentuan dapat menunjang proses pembelajaran khususnya di sekolah. Pelaksanaan proses pembelajaran juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah itu sendiri. Namun, kenyataanya tidak semua materi yang ada di dalam buku PKn diajarkan kepada siswa. Berkembangnya zaman sekarang ini menuntut kualitas pendidikan harus meningkat supaya tidak tertinggal dengan bangsa lain. Perubahan kurikulum juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.Kurikulum yang sekarang digunakan adalah Kurikulum KTSP.

Beralihnya Kurikulum 2013 kembali pada Kurikulum KTSP di karenakan masih ada kekurangan dan masih banyak guru yang belum memahami Kurikulum 2013 (Djahiri. 2002 : 93).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan dalam pembentukan karakter siswa, hal ini diantaranya untuk meningkatkan pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, siswa akan dapat membedakan hal yang baik dan tidak baik, Sebagaimana diungkapkan oleh Sunarso dkk (2008:1) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya peranan penting pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan kemampuan keterampilan kewarganegaraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta. 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat siswa dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan pada Pendidikan Kewarganegaraan. 3) Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta.

Dalam kaitannya sebagai pendidikan karakter, PKn sebagai pendidikan karakter memiliki misi yang harus diemban. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen PKn adalah pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) , keterampilan

kewarganegaraan (*Civic Skills*) dan karakter kewarganegaraan (*Civic Dispotisions*). Dengan demikian walaupun tanpa ada kebijakan pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran. PKn memang harus mengembangkan pendidikan karakter.

Kekritisan terhadap pemerintahan penting dalam pengembangan dan pemeliharaan demokrasi yang bisa didapatkan dari pendidikan kewarganegaraan baik konteks *civic school* maupun *civic society* yang mendasari warga Negara untuk berpartisipasi politik yang berguna sebagai sarana pembangun bangsa. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, terutama dengan misi PKn dalam mengembangkan pendidikan karakter. Perlu adanya pelaksanaan atau real dilapangan sehingga nilai-nilai karakter kewarganegaraan dapat diinternalisasikan melalui proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran PKn meliputi tiga kegiatan yaitu pendahuluan, inti (Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi), dan penutup. Rangkaian proses pembelajaran berkarakter harus mengandung unsur-unsur nilai karakter yang akan membuat siswa terbiasa melakukan sesuatu yang baik dikelas dan diharapkan dapat terbiasa melakukannya diluar kelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan, kepala sekolah dan siswa, untuk memperoleh data mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan keterampilan kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019

Pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas merupakan proses belajar mengajar yang mencakup baik indera pendengaran maupun indera penglihatan. Di mana dalam proses belajar mengajar selain menyampaikan materi guru juga dituntut untuk mengintegrasikan keterampilan kewarganegaraan pada setiap materi pembelajaran dan pada setiap mata pelajaran. Oleh karena itu siswa diharapkan nantinya memiliki kemampuan tidak hanya pada aspek kognitif semata, tetapi siswa juga memiliki kemampuan dalam aspek psikomotorik dan aspek afektif.

Pada hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan karakter dalam proses belajar mengajar secara implisit telah dilakukan dan disampaikan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 26 Surakarta. Dengan memberikan teladan untuk masuk kelas terlebih dahulu sebelum siswa berada di kelas menjadi pengajaran nilai yang secara tidak langsung memberikan nilai disiplin kepada siswa untuk dapat disiplin dalam waktu.

Pengecekan kerapian dan kebersihan kelas yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 26 Surakarta secara tidak langsung mengajarkan kepada siswa untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan serta mengajarkan

kepada siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Pengecekan presensi yang dilakukan secara tidak langsung mengajarkan kepada siswa untuk saling mengenal dan menghormati. Karena ketika ada siswa yang sakit guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 26 Surakarta memberikan himbauan untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan saling peduli kepada sesama.

Penyisipan keterampilan kewarganegaraan pada proses belajar mengajar dari hasil observasi menunjukkan bahwa keterampilan kewarganegaraan lebih banyak disisipkan pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan menunjukkan bahwa keterampilan kewarganegaraan yang diharapkan tertanam pada diri siswa yaitu keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan mempengaruhi orang lain, dapat memecahkan masalah, pengambilan keputusan, mengelola konflik dan dapat bekerjasama.

Sedangkan untuk pembentukan keterampilan kewarganegaraan meskipun masih secara implisit sudah mulai terlihat pada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Seperti pada materi *memahami kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia* secara implisit sudah disisipkan keterampilan kewarganegaraan untuk mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Hal ini terlihat pada kegiatan tanya jawab terkait tugas dan wewenang lembaga tinggi negara, di samping menjelaskan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga negara. Guru Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pemahaman bahwa sebagai pejabat negara yang salah satu tujuannya adalah mensejahterahkan rakyat menjadi

tujuan utama, bukan sebaliknya mensejahterahkan diri sendiri maupun keluarga atau kelompoknya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan pendekatan berbasis nilai dan pendekatan berpikir kritis. Di setiap pengajaran dalam kegiatan elaborasi yang merupakan kegiatan inti guru bersama siswa mendiskusikan atau saling tanya jawab terkait materi yang sebelumnya telah dijelaskan, kemudian guru mencoba memadukan dan mengkaitkan dengan nilai-nilai keterampilan kewarganegaraan. Seperti pada materi *mendiskripsikan sistem pemerintahan Indonesia*, ketika kegiatan tanya jawab selain menjawab pertanyaan siswa guru juga menyisipkan keterampilan kewarganegaraan kepada siswa, sadar atau tidak secara implisit guru menyisipkan keterampilan kewarganegaraan yaitu keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan mempengaruhi orang lain, memecahkan masalah, dan bekerjasama.

Tidak sampai di situ guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam setiap pertemuan pembelajaran selalu mencoba untuk memberikan informasi terbaru terkait persoalan apa yang sedang terjadi, karena di SMP Negeri 26 Surakarta ini untuk akses informasi sangat terbatas maka salah satu cara yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah dengan memberikan informasi terbaru kepada siswa. Kemudian dari informasi ini siswa dimintai pendapat mereka, baik berupa tanggapan positif ataupun tidak siswa memberikan pandangan mereka tentang persoalan yang sedang terjadi. Pada kegiatan ini yang biasanya dilakukan pada kegiatan pendahuluan setelah presensi guru Pendidikan Kewarganegaraan mengharapakan siswa secara perlahan

mulai peduli dengan kejadian-kejadian yang sedang terjadi karena kasus yang dihadirkan adalah kasus dari pengalaman-pengalaman nyata dan tidak dibuat-buat. Dengan demikian lama-kelamaan dapat membangkitkan kemampuan berpikir kritis karena berangkat dari kenyataan sosial yang pada gilirannya akan mampu memberi kontribusi berharga bagi pemecahan masalah.

Dalam proses pembentukan keterampilan kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan salah satu ujung tombak pendidikan keterampilan kewarganegaraan tentunya diharapkan nantinya terbentuk suatu keterampilan kewarganegaraan yang diharapkan sebagai dasar siswa berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan keterampilan kewarganegaraan siswa di SMP Negeri 26 Surakarta dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan ini berupa kondisi pendidikan formal. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berada pada jangkauan masyarakat dan individu. Jadi usaha pengembangan keterampilan kewarganegaraan seseorang dapat dilakukan oleh masyarakat atau individu sebagai bagian dari lingkungan melalui rekayasa faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam konteks pembentukan keterampilan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting karena perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari proses keterampilan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh faktor lingkungan ini. Dengan kata lain perkembangan dan pembentukan keterampilan kewarganegaraan memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus-menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan

penguatan serta harus dibarengi dengan nilai-nilai luhur.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Siswa Dalam Mengikuti Mata Pelajaran Kewarganegaraan

Faktor pendukung pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut:

1) Kepemimpinan Kepala Sekolah

Pemimpin sangat penting dalam menciptakan kesatuan arah dan tujuan organisasi serta menciptakan dan mempertahankan lingkungan internal sehingga personel terlibat secara penuh untuk mencapai tujuan pendidikan. SMP Negeri 26 Surakarta dipimpin oleh kepala sekolah, dimana kepala sekolah merupakan seorang manajer tertinggi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah berkewajiban untuk menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi agar sesuai dengan visi, misi, tujuan sekolah, serta bertanggung jawab kepada pemerintah kota dan Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaan manajemen mutu pemimpin harus menetapkan kebijakan dan sasaran mutu sekolah.

2) Kompetensi Guru

Kompetensi guru dalam melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya pembentukan keterampilan kewarganegaraan juga dibiasakan melalui pemodelan dan pembiasaan dari pendidik dalam hal bersosialisasi di lingkungan sekolah. Pembiasaan yang dilakukan oleh pendidik secara langsung antara lain dalam hal melakukan kegiatan seminar, maupun mengikutkan siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Selain itu pendidik juga memberikan

contoh keteladanan yang baik kepada siswa. Melalui keteladanan yang diberikan oleh guru PKn diharapkan siswa dapat dapat meniru perilaku keterampilan kewarganegaraan yang dilakukan oleh guru.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembentukan keterampilan kewarganegaraan siswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta antara lain:

- 1) Terlalu banyak materi yang harus dikuasai oleh siswa, Seperti untuk memahami Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa bagi para siswa tidak bisa dipraktekkan.
 - a) Kurikulum yang ada saat ini terlalu tinggi kajian tetapi lemah dipraktek. Hal-hal praktis seperti pengamalan Pancasila sehari-hari, lagu kebangsaan yang tidak masuk dimateri.
 - b) Sistem sekolah yang kurang mendukung dalam membentuk keterampilan kewarganegaraan, sehingga siswa ketika ditanya makna upacara, makna Pancasila, dan UUD 1945 itu masih banyak yang kebingungan.
- 2) Materi Pendidikan Kewarganegaraan terkesan *overload*, tumpang tindih, begitu banyak hal yang harus diajarkan dan dihafalkan oleh siswa, sehingga membebani siswa.
- 3) Keterbatasan metode dan media pembelajaran juga termasuk salah satu hambatan yang masih sering ditemukan. Ketertarikan siswa pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih perlu mendapat perhatian seksama, karena metode pembelajaran yang sering dilakukan paling banyak adalah ceramah.
- 4) Latar belakang siswa yang beraneka ragam memberikan konsekuensi pada guru untuk menentukan teknik atau metode pembelajaran yang dapat

diterima oleh seluruh siswa. Kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam memahami materi ini pula menuntut guru harus profesional dalam menjelaskan materi baik dari segi kognitif, psikomotorik, maupun afektif.

- 5) Keterbatasan waktu, yang mana waktu yang singkat dengan materi yang banyak menjadikan terget pencapaian yang harus dicapai adalah segi kognitif.
- 6) Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tingkat dan kemauan siswa yang berbeda, ada beberapa yang antusias mengikuti tetapi ada beberapa yang penting absen.
- 7) Kemudian kendala dalam melakukan penilaian yang berdimensi sikap, karena penilaian yang dilakukan adalah sebatas pengamatan jadi sedikit kesulitan ketika kemampuan menghafal setiap siswa itu tidak bisa diandalkan. Dalam artian mungkin yang bisa dihafal adalah siswa dengan prestasi terbaik kemudian yang terendah sangat mudah untuk dihafalkan.
- 8) Kurang bisa *update* undang-undang terbaru, karena faktor teknologi. Keterbatasan waktu mungkin juga karena tuntutan yang ada bukan hanya mengajar tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi kembali kepada penghasilan dalam hal ini tingkat kesejahteraan masih perlu mencari pekerjaan lain.

Hambatan-hambatan yang ada di atas, menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan guru memerlukan upaya guna mengatasi kendala yang terjadi. Di sisi lain, sekolah sebaiknya perlu menciptakan pembiasaan dan sosok atau keteladan yang nyata, sehingga dapat menjadi contoh langsung bagi setiap

siswa dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari.

Berbagai hambatan yang terjadi dibutuhkan upaya untuk mengatasinya. Upaya atau solusi yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 26 Surakarta dalam menghadapi hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengamatan sepanjang proses pembelajaran berlangsung kemudian juga melalui model pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi siswa. Seperti menggunakan pendekatan berpikir kritis di mana setiap pertemuan diberikan informasi terbaru (*Breaking News*) terkait persoalan yang sedang terjadi untuk menarik perhatian siswa agar lebih fokus dalam pembelajaran nantinya.
- 2) Kepraktisan siswa terkait simbol-simbol yang ada dapat diatasi dengan diterapkannya dalam pembelajaran yang sifatnya non-akademik atau ekstrakurikuler seperti lewat kegiatan upacara, kegiatan kepramukaan.
- 3) Pemberian berita terbaru ini juga dimaksudkan agar siswa lebih peduli pada lingkungan sosial dan menjadikan mereka kritis dalam menanggapi berbagai persoalan yang sedang terjadi. Kemudian pemberian tugas tambahan ketika waktu dalam menjelaskan materi tidak cukup, pemberian tugas ini bertujuan agar siswa memperoleh pengetahuan yang belum disampaikan oleh guru.
- 4) Pemberian motivasi di setiap kegiatan pembelajaran guna menumbuhkan semangat dan minat siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Hambatan-hambatan yang terjadi telah dilakukan upaya dalam mengatasinya, meskipun belum sepenuhnya dapat berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masalah pembentukan keterampilan

kewarganegaraan bukan hanya tanggungjawab guru Pendidikan Kewarganegaraan tetapi semua. Upaya-upaya yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian guru guna memberikan solusi dalam mengatasi krisis keterampilan kewarganegaraan yang terjadi saat ini. Namun demikian, upaya yang sudah dilakukan masih belum dapat sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan baik dari guru maupun dari sekolah sehingga perlu tindak lanjut dari semua pihak dan perhatian semua komponen sekolah untuk memberikan keteladanan dan pembiasaan yang nyata kepada siswa guna membentuk keterampilan kewarganegaraan pada diri siswa.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi sebagian besar guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun termasuk guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta. Berbagai macam alasan mengenai hal tersebut, seperti karena keterbatasan waktu dan banyak materi yang harus disampaikan, ketika berada dalam kelas, kondisi kelas tidak sesuai rencana, karena yang dihadapi guru dalam kelas adalah manusia, dan manusia bersifat fleksibel dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sehingga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran digunakan sebagai pedoman, dan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas lebih bersifat fleksibel.

Pengimplementasian pembentukan keterampilan kewarganegaraan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam

proses pembelajaran di kelas dapat ditunjukkan dalam penerapan metode pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan yang bertujuan lebih kepada sikap siswa, maka pembelajaran lebih ditekankan pada praktek misalnya dengan melihat fenomena yang ada sehingga siswa dapat mengambil sikap dan menerapkan materi yang pernah didapat.

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 26 Surakarta, tidak semua guru Pendidikan Kewarganegaraan menerapkan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan karena beberapa faktor, baik faktor dari guru tersendiri maupun dari siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anik Indriyani, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Sekolah menyatakan bahwa:

Salah satu hambatan dalam penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan adalah dari guru, siswa dan lingkungan sekolah. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam pelaksanaan pembentukan keterampilan kewarganegaraan pada siswa (Hasil wawancara tanggal 28 Oktober 2018).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu Trini Suwarni Setiyaningsih, S.Pd selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa: Hambatan dalam penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan adalah pada kondisi dan karakter siswa yang

berbeda-beda. Guru harus memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa agar pembelajaran dapat berjalan efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan adalah dari siswa dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Apabila dilihat dari kondisi dan lingkungan yang ada, maka hal tersebut tidak menjadi suatu hambatan karena kondisi dan lingkungan di SMP Negeri 26 Surakarta sudah dirancang agar pembelajaran disana berjalan efektif termasuk dalam pembelajaran pendidikan moral (Hasil wawancara tanggal 29 Oktober 2018).

Penerapan metode pembelajaran yang sesuai memang sangat penting dalam proses pembelajaran disamping agar pembelajaran yang dirancang guru tidak monoton sehingga dapat meningkatkan antusias dan motivasi belajar siswa tetapi juga agar tersampainya tujuan pembelajaran dan pembelajaran dapat berjalan efektif. Metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta yaitu:

1. Ceramah Bervariasi

Metode ceramah merupakan metode yang hampir selalu diterapkan dalam pembelajaran. Agar penyampaian materi dengan ceramah tidak membosankan metode ceramah dibuat lebih bervariasi dengan tanya jawab dan atau dengan cerita. Metode ceramah bervariasi dengan tanya jawab kepada siswa agar pembelajaran tidak hanya dari satu arah yaitu guru tetapi juga dari siswa, diselingi juga cerita mengenai kehidupan sehari-hari atau berita yang faktual yang sedang terjadi, dan

presentasi menggunakan *power point* agar siswa tidak jenuh.

Metode ceramah bervariasi dengan tanya jawab telah melatih siswa menjadi kritis dan guru dapat menilai kemampuan dan sikap siswa mengenai pemecahan masalah dengan tanya jawab. Ceramah dengan cerita menjadi metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa di SMP Negeri 26 Surakarta. Siswa berpendapat bahwa pembelajaran dengan cerita menjadi lebih menarik karena tidak terpaku pada materi dan penyampaian dengan cerita menjadi lebih mudah diterima bagi siswa. Tidak jarang pula guru memberikan motivasi-motivasi kepada siswa. Pembelajaran dengan metode ceramah bervariasi dengan cerita dan bukan hanya terpaku terhadap materi yang diajarkan mempunyai kelebihan tersendiri bagi siswa. Siswa lebih mudah menerima pelajaran dengan cerita yang di dalamnya penuh dengan motivasi-motivasi dan contoh fenomenal yang sedang terjadi sehingga siswa dapat mengetahui contoh penerapan dari materi yang didapat. Secara umum metode pembelajaran ini sebagai implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah cukup efektif untuk diterapkan kepada siswa.

2. Diskusi

Diskusi merupakan metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam kelas melatih kerja sama siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berasal dari pendapat siswa kemudian diperkuat dengan pendapat guru. Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 26 Surakarta guru menerapkan metode diskusi ini yang sebelumnya guru memberikan beberapa informasi tentang materi pelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa memahami kegiatan yang akan mereka kerjakan dalam proses pembelajaran. Pada umumnya dalam

menerapkan metode ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang kemudian diberikan tema yang sama ataupun tema yang berbeda untuk diselesaikan secara berkelompok. Siswa diberikan kebebasan untuk mencari informasi dari manapun semisal buku pelajaran untuk mencari data atau informasi terkait permasalahan yang akan didiskusikan. Metode diskusi dapat menjadikan siswa lebih berfikir kritis, mendorong siswa untuk berani mengekspresikan pendapat, dan agar siswa saling menghargai pendapat orang lain.

Metode diskusi merupakan metode yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran pendidikan moral. Metode ini merupakan perkembangan pendekatan moral kognitif yang didasarkan pada dilema moral. Proses diskusi mulai disajikan dengan cerita yang mengandung dilema. Dalam diskusi, siswa didorong untuk menentukan posisi apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang terlibat, apa alasan-alasannya. Siswa diminta mendiskusikannya tentang alasan-alasan tersebut dengan teman-teman satu kelompok (Winarno, 2013: 202).

Penggunaan metode diskusi akan dapat menghidupkan suasana kelas. Dalam pendekatan moral kognitif guru memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk berpikir dan sampai pada kesimpulan yang sesuai pada tingkat perkembangan *moral reasoning* masing-masing, dalam pengajaran Pendidikan Nilai siswa diarahkan sampai pada kesimpulan akhir yang sama, sesuai dengan nilai-nilai sosial tertentu, yang bersumber dari Pancasila dan budaya luhur bangsa Indonesia ataupun nilai local suatu daerah (Winarno, 2013: 214).

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 26 Surakarta, proses diskusi diserahkan pada masing-masing kelompok dan guru hanya mengawasi

jalannya diskusi. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat mengembangkan pemikirannya sendiri dan diharapkan dapat membuat kesimpulan hasil diskusi. Setelah proses diskusi selesai guru memilih kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keaktifan siswa dan dapat mengetahui sikap siswa dalam proses pembelajaran.

Kemudian guru memberikan *feedback* kepada siswa dan ada beberapa siswa yang melakukan tanya jawab untuk mengkonfirmasi hasil diskusi. Di akhir proses jalannya diskusi guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi untuk menyamakan persepsi, sehingga siswa akan lebih paham mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Secara umum metode diskusi sebagai salah satu metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan sudah cukup baik, karena melalui diskusi guru dapat mengetahui pemahaman siswa dan sikap moral siswa yang terbentuk dalam proses pembelajaran. Walaupun, masih terdapat beberapa hambatan diantaranya tidak semua siswa aktif dalam proses diskusi, metode diskusi ini baik untuk pembelajaran pendidikan moral.

3. Metode Resitasi (Penugasan)

Metode resitasi (penugasan) merupakan metode belajar mengajar dimana guru memberikan tugas kepada siswa sebagai kegiatan belajar dan kemudian ada pertanggungjawaban dari siswa atas kegiatan belajar yang dilakukan. Metode ini diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta sesuai yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada kompetensi dasar menerapkan norma-norma, kebiasaan-

kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siswa lebih diharapkan mengamati kondisi dan keadaan lingkungan sekitar tentang pelaksanaan norma, kemudian siswa dituntut untuk menerapkan norma norma tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Metode tersebut juga dapat menjadi refleksi bagi siswa.

Metode resitasi (penugasan) untuk mencari berita dalam surat kabar dan pembuatan klipng bertujuan agar siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada saat pembelajaran. Melalui penugasan tersebut siswa diajak untuk melihat secara nyata tentang contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga diharapkan siswa dapat menghargai penegakan Hak Asasi Manusia, dan juga ikut turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil pengamatan 12 Oktober 2018 dalam proses pembelajaran pada kompetensi dasar 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, ada suatu penugasan yang diberikan oleh guru yang tidak biasa diberikan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu siswa diberikan tugas untuk mengemukakan pendapat secara tertulis yaitu dalam bentuk gambar yang sederhana yang penuh makna sesuai dengan pesan apa yang ingin siswa sampaikan kebanyakan orang. Penugasan tersebut biasa diberikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia atau kesenian yaitu pembuatan karikatur. Penugasan ini dapat melatih siswa agar lebih kreatif dan mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang bersangkutan serta dapat mengembangkan pemikiran siswa. Sehingga siswa dapat menyampaikan makna dari gambar yang dibuat yang berupa nilai-nilai moral yang harus ditanamkan.

Metode resitasi ini dapat dimasukan dalam salah satu model pembelajaran afektif yaitu merupakan pengembangan model nondirektif. Dimana para siswa memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri. Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Guru berperan sebagai fasilitator dan hendaknya menghargai potensi dan kemampuan siswa. Penggunaan model ini bertujuan untuk membantu siswa mengaktualisasikan dirinya (Sukmadinata, 2005: 194).

Melalui berbagai penugasan yang diberikan oleh guru, seperti mencari berita, membuat klipng, dan tugas untuk mengemukakan pendapat secara tulisan melalui sebuah gambar, merupakan cara siswa untuk belajar mengaktualisasikan kemampuan dan potensi siswa yang mereka miliki. Sehingga dalam pembelajaran tidak hanya untuk menghafal dan mengetahui tetapi juga memiliki sikap atau ketrampilan dalam menerapkan pengetahuan atau materi yang pernah mereka dapatkan.

Metode resitasi ini cukup baik untuk diterapkan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi keterampilan kewarganegaraan tanpa kendala yang berarti. Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi moral lebih kepada penanaman nilai dan sikap moral yang akan terbentuk dibandingkan pengetahuan moral. Penugasan tersebut merupakan penerapan dari materi yang telah diperoleh siswa.

4. Metode debat

Metode debat adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berdiskusi antara 2 (pihak) atau lebih baik secara individu maupun kelompok untuk berbagi argument mengenai berbagai masalah yang terdiri dari kelompok pro dan kontra terhadap masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 26

Surakarta, metode ini digunakan untuk menerapkan praktik mengenai mengaktualisasikan kebebasan berpendapat secara lisan. Metode ini dapat menumbuhkan sikap kritis siswa terhadap suatu permasalahan dan dapat menjadi penilaian sikap siswa dalam menghadapi suatu permasalahan.

Dalam penerapan metode ini guru menjelaskan materi mengenai macam-macam mengemukakan pendapat di muka umum dengan ceramah. Guru berceramah mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian guru membagi siswa menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pro dan kontra terhadap tema tersebut. Guru memberikan motivasi dan aturan main dalam debat.

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 26 Surakarta ada beberapa hambatan dalam penerapan metode debat yaitu dalam debat hanya siswa tertentu saja yang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, siswa belum bisa menempatkan posisi dirinya dalam debat apabila sebenarnya siswa tersebut setuju atau tidak setuju mengenai tema debat tersebut, masih banyak siswa yang belum bisa mengontrol diri dan menjaga emosi, dan siswa tidak dapat fokus pada tema debat karena kebayakan siswa terpancing dengan jawaban lawan. Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan keaktifan siswa, menumbuhkan sikap kritis siswa dan menumbuhkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Melalui metode ini diharapkan siswa dapat menempatkan sikap yang baik ketika berbicara dan berpendapat di depan umum atau dalam masyarakat. Dalam penerapan metode ini guru harus memperhatikan mengenai masalah yang akan dibahas sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga melalui metode ini siswa dapat memperdalam pemahaman mengenai materi yang

terkait. Selain itu, pada akhir kegiatan guru harus memberikan evaluasi mengenai kegiatan tersebut dan mengenai nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dan sikap-sikap yang harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan dengan guru menyusun perangkat pembelajaran, baik berupa silabus, RPP dan lembar penilaian siswa, selanjutnya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, misalnya ceramah bervariasi tanya jawab, diskusi dan resitasi (penugasan). 2) Faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran Pelajaran Kewarganegaraan guna membentuk keterampilan kewarganegaraan yaitu adanya dukungan dari kepala sekolah yang mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan sekolah serta kompetensi guru PKn dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Sedangkan faktor yang menghambat siswa dalam mengikuti Mata Pelajaran Kewarganegaraan yaitu terlalu banyak materi yang harus dikuasai oleh siswa, materi Pendidikan Kewarganegaraan terkesan *overload*, tumpang tindih, begitu banyak hal yang harus diajarkan dan dihafalkan oleh siswa, sehingga membebani siswa, keterbatasan metode dan media pembelajaran, latar belakang siswa yang beraneka ragam, keterbatasan waktu dalam mengajar, kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 3) Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah setiap pertemuan diberikan informasi terbaru terkait persoalan yang sedang terjadi untuk menarik perhatian siswa agar lebih

fokus dalam pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang sifatnya non-akademik atau ekstrakurikuler seperti lewat kegiatan upacara, kegiatan kepramukaan, serta pemberian motivasi di setiap kegiatan pembelajaran guna menumbuhkan semangat dan minat siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah disampaikan, saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Sekolah
Pihak sekolah lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap siswanya secara rutin dan kontinyu dalam pembentukan keterampilan kewarganegaraan siswa serta lebih meningkatkan komunikasi antara orang tua dan masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan orang tua siswa demi kelancaran terciptanya keterampilan kewarganegaraan yang diharapkan.
2. Kepada Pendidik
Guru hendaknya berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembentukan keterampilan kewarganegaraan ke dalam perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, metode serta media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik lagi demi terciptanya kelancaran pembentukan keterampilan kewarganegaraan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Wahab. 2004. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta. Ditjen.Depdikbud.
- Cholisin. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic*

Education). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.

Depdiknas, 2005. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Depdiknas, 2006. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara

Nova Anggarani. 2011. "Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter di SMP Se-Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 2011/2012". *Jurnal Global Ghanesha*. Vol 3.No.2. Hal.1-18(diakses pada tanggal 10 September 2018 jam 13.00)

Mukhamad Murdiono. 2014. Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*). *Jurnal Penelitian*. Fakultas Ilmu Sosial & Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiyono.2001. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi Dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Sukmadinanta, Nana Syaodih. 2007. ***Metode Penelitian Pendidikan***. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Suharsimi Arikunto. 2006. ***Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)***. Jakarta: PT Rineka Cipta.

_____. 2013. ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Sumantri, Numan. 2000. ***Pembaharuan Pendidikan IPS***. Bandung : Rosda Karya.

Sutrisno. 2014. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global”. ***Skripsi***. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.